



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Nomor B/1115/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 83 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 83), untuk kedua kalinya diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

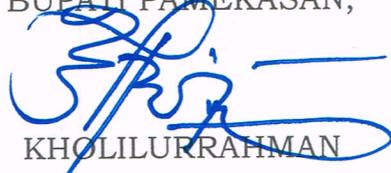
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN

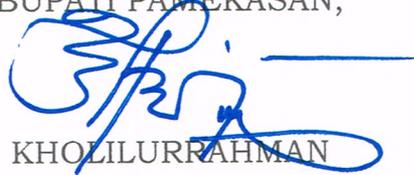
LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG  
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  
DAN ANALISIS BEBAN KERJA

REKAPITULASI HASIL ANALISIS JABATAN

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DPRD
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. DINAS KESEHATAN
6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9. DINAS SOSIAL
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15. DINAS PERHUBUNGAN
16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA  
KERJA
18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
21. DINAS PERIKANAN
22. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA
26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
28. KECAMATAN TLANAKAN
29. KECAMATAN PADEMAWU
30. KECAMATAN GALIS
31. KECAMATAN PAMEKASAN
32. KECAMATAN PROPO
33. KECAMATAN PALENGAAN
34. KECAMATAN PEGANTENAN
35. KECAMATAN LARANGAN
36. KECAMATAN PAKONG

37. KECAMATAN WATU
38. KECAMATAN BATUMARMAR
39. KECAMATAN KADUR
40. KECAMATAN PASEAN
41. RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
42. RSUD WARU

BUPATI PAMEKASAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

KHOLILURRAHMAN

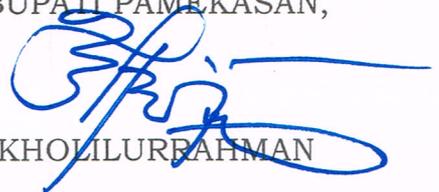
LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 2  
 TAHUN 2021 TENTANG  
 PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA

REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA (BEZETTING)	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	USULAN PENGADAAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	139	629	490
2	SEKRETARIAT DPRD	33	141	108
3	INSPEKTORAT DAERAH	33	138	105
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3999	5200	1201
5	DINAS KESEHATAN	12	0	12
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57	375	318
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32	256	224
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50	805	755
9	DINAS SOSIAL	36	120	84
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	46	146	100
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	203	902	699
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	114	495	381
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24	166	142
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	106	84
15	DINAS PERHUBUNGAN	49	278	327
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27	183	156
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	35	240	205
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29	291	262
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	36	301	265
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25	106	81
21	DINAS PERIKANAN	27	124	97

22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	56	178	122
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	26	154	128
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50	171	121
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	37	123	86
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24	138	114
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16	95	79
28	KECAMATAN TLANAKAN	18	88	70
29	KECAMATAN PADEMAWU	40	84	44
30	KECAMATAN GALIS	15	78	63
31	KECAMATAN PAMEKASAN	15	77	62
32	KECAMATAN PROPO	26	71	45
33	KECAMATAN PALENGAAN	14	67	53
34	KECAMATAN PEGANTENAN	17	67	50
35	KECAMATAN LARANGAN	17	69	52
36	KECAMATAN PAKONG	16	76	60
37	KECAMATAN WARU	14	78	64
38	KECAMATAN BATUMARMAR	15	78	63
39	KECAMATAN KADUR	17	78	61
40	KECAMATAN PASEAN	14	70	56
41	RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO	171	389	218
42	RSUD WARU	113	562	449
JUMLAH		5.759	13.793	8.156

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN